Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM

Saiful Bahri¹⁾, Muammar Khadafi²⁾

^{1,2)} Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the implementation of DSN-MUI fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia at ACM Muslimah swimming pools. The research uses a qualitative and normative. The research results show that the swimming pool has partially implemented sharia principles, but there are still aspects that need improvement. The facilities for places of worship are small and need to be enlarged, while some areas around the pool are still not clean. Transactions and agreements in tourism activities need to pay more attention to sharia principles. Improvements to facilities in places of worship and increased cleanliness around pools are recommended to ensure compliance with the DSN-MUI fatwa. By making these improvements, the swimming pool can provide a better experience to visitors and be more consistent with the applied sharia principles.

Keywords: DSN-MUI; Fatwa, Islamic Tourism, ACM Muslimah Swimming Pool; South Tangerang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha kolam renang Muslimah ACM Kota Tangsel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolam renang tersebut sudah sebagian menerapkan prinsip-prinsip syariah, tetapi masih terdapat aspek yang perlu perbaikan. Fasilitas tempat ibadah terbilang kecil dan perlu diperbesar, sementara sebagian area sekitar kolam masih kurang bersih. Transaksi dan perjanjian dalam kegiatan wisata perlu lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Perbaikan fasilitas tempat ibadah dan peningkatan kebersihan di sekitar kolam direkomendasikan untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI. Dengan melakukan perbaikan ini, kolam renang dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengunjung dan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan.

Kata Kunci: DSN-MUI; Fatwa, Pariwisata Syariah, Kolam Renang Muslimah ACM; Tangerang Selatan

Article History:

Received: March/28/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/08/2024

Corresponding Author: saifulefull68@gamil.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/671/pdf>

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan ketentuan Fatwa Dsn Mui No.108/Dsn-Mui/X/2016 dan untuk memahami kesesuaian penyelenggaraan dan pengelolaan yang dijalankan oleh kolam renang Muslimah ACM, Tangerang Selatan, Banten dengan Fatwa Dsn Mui No.108/Dsn-Mui/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah.

Saat ini, perkembangan ekonomi syariah, terutama dalam sektor pariwisata halal, menghasilkan inovasi baru, salah satunya adalah wisata halal. Di Indonesia, pertumbuhan pariwisata halal sedang berkembang pesat. Ini disebabkan oleh jumlah besar umat Islam dan wisatawan Muslim di Indonesia. Seiring dengan itu, kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah juga meningkat. Meskipun begitu, pariwisata masih dianggap sebagai fenomena sosial yang kompleks dan sering kali dinilai negatif oleh beberapa orang, karena masih ada pandangan bahwa pariwisata terkait dengan aspek-aspek negatif yang melibatkan berbagai aspek manusia, termasuk aspek sosial, psikologis, ekologis, ekonomi, budaya, dan sebagainya (Yulfianis, 2021).

Keberadaan wisata syariah atau pariwisata halal yang sekarang sudah berbeda dengan wisata syariah yang selama ini dijalankan di Indonesia seperti ziarah kuburan para wali dan masjid, namun wisata syariah sekarang yang sudah dikembangkan akan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi setiap pengunjung atau wisatawan Muslim untuk menikmati hiburan yang berasal dari alam, budaya, atau buatan dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip agama Islam. Pengembangan industri wisata syariah tidak akan mengancam atau menghambat keberlangsungan setiap pelaku usaha industri wisata konvensional, namun wisata syariah akan berperan sebagai pelengkap dan pendamping bagi industri wisata konvensional (Ansari, 2020).

Salah satu cara untuk memajukan pariwisata di Indonesia adalah dengan mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh permintaan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia yang mendukung konsep Pariwisata Syariah. Pada awalnya, pandangan masyarakat tentang pariwisata syariah terbatas pada makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan yang mematuhi aturan yang terdapat dalam Al-Quran. Namun, dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, terjadi evolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pola hidup yang semakin mempertimbangkan aspek kehalalan (Destiana & Astuti, 2019).

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Fatwa

Kata fatwa merupakan bentuk Tunggal, yang dalam bentuk jamaknya adalah *fatawa*. istilah yang berasal dari Bahasa arab ini sudah resmi menjadi Bahasa

Indonesia, sehingga orang Indonesia sudah akrab dengan istilah fatwa ini. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa adalah Keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah dan juga bisa diartikan sebagai pandangan hukum yang disampaikan oleh ulama kepada individu atau masyarakat yang meminta, atau karena ada situasi yang memunculkan pertanyaan hukum tertentu. Namun, perlu dipahami bahwa Fatwa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari istilah-istilah seperti *fiqhi* (hukum Islam), *ijtihad* (penafsiran hukum), atau hukum Islam dalam bentuk *fiqih*. Yang pertama, Fatwa bersifat kasuistik, artinya ia berkaitan dengan situasi atau kasus spesifik yang diajukan oleh seseorang atau masyarakat. Ini berarti bahwa setiap Fatwa dapat bervariasi tergantung pada konteks unik dari kasus yang sedang dibahas. Kedua, Fatwa bersifat normatif, yang berarti ia memberikan pandangan hukum berdasarkan konteks kasus tertentu, dan pandangan ini tidak selalu berlaku umum (Sajari, 2015)

Sejarah Adanya Fatwa

Sejarah adanya fatwa adalah dilatarbelakangi oleh lahirnya majlis ulama Indonesia karena kesadaran para pemimpin umat Islam akan kebutuhan landasan kokoh untuk membina dan membimbing Masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalani kehidupan ditengah kemajuan pemikiran modern, yang dimana jika tidak ada Lembaga yang membina atau memimpin umat Islam akan menimbulkan perpecahan. Sejarah fatwa dan berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki akar yang dalam dalam konteks kehidupan umat Islam di Indonesia (Mujib, 2015).

Pada waktu itu, pemimpin umat Islam menyadari bahwa dengan berkembangnya pemikiran modern dan perkembangan masyarakat, sangat penting untuk memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan ajaran Islam. Tanpa pedoman yang jelas, risiko terjadinya perpecahan dalam penafsiran hukum Islam dan panduan keagamaan bisa meningkat. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Perannya adalah memberikan panduan, pengarahan, dan perlindungan kepada umat Islam di seluruh negeri.

MUI berdiri setelah berlangsungnya sebuah pertemuan dan musyawarah yang melibatkan ulama, cendekiawan, dan pemimpin agama dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam musyawarah tersebut, 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia dan 10 ulama dari organisasi-organisasi Islam berkumpul. Lahirnya MUI bertujuan untuk mengumpulkan para ulama dalam satu wadah yang bertujuan untuk membahas masalah-masalah umat dan mengeluarkan fatwa serta mempromosikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Piagam berdirinya MUI berisi komitmen dari semua ulama yang hadir dalam musyawarah nasional ulama tersebut dan ditandatangani sebagai bukti kesepakatan mereka (Sani, 2021)

Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Penyelenggara Pariwisata Syariah

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsnmui/X/2016 yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan kedua, belum

adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam Fatwa Dsn-Mui.

Alasan yang pertama adalah dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat salah satunya adalah disektor pariwisata syariah, dan alasan kedua adalah lahirnya fatwa ini dikarenakan belum adanya aturan terkait pengembangan pariwisata syariah di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. maka dari itu peraturan atau regulasi tentang pariwisata syariah perlu dibuat supaya pelaksanaannya dapat mengacu pada peraturan atau regulasi yang jelas (Ilham et al., 2022).

Pengertian Pariwisata

Pariwisata dalam istilah bahasa arab dikenal dengan kata "*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*" atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *tourism*, secara defenisi berarti suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik itu secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu (Arifin, 2015).

Jadi, secara keseluruhan, definisi pariwisata menurut Cooper (1993) mencakup seluruh rangkaian perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan yang melibatkan aktivitas wisata dan tinggal sementara, dengan penekanan bahwa tujuannya adalah untuk rekreasi dan bukan untuk bekerja, Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dari tempat tinggal asal mereka ke suatu tempat yang bersifat sementara dengan tutujuan melakukan kegiatan wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah serta pengusaha. dan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (Riani, 2021).

Menurut kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau berkelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, dan ilmu, namun, pada hakekatnya, pengertian pariwisata itu adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab atas kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat (Anden, 2021).

Bentuk Usaha Pariwisata

Pariwisata adalah sektor yang melibatkan berbagai aktivitas, layanan, dan produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata. Industri pariwisata ini memiliki potensi besar untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang memuaskan bagi para wisatawan. Ketika kita mempertimbangkan aspek produk dan layanan dalam pariwisata, kita dapat menggolongkannya menjadi dua hal utama yaitu produk dan pelayanan (Yulianti, 2020).

Di sisi lain, pelayanan dalam industri pariwisata mencakup semua aspek yang memastikan pengalaman wisatawan menjadi lancar, nyaman, dan berkesan. Ini melibatkan layanan pelanggan di hotel, restoran, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan tempat-tempat wisata. Pelayanan juga mencakup promosi dan informasi mengenai destinasi wisata, serta keamanan dan keselamatan para wisatawan selama perjalanan mereka. Secara keseluruhan, produk dan pelayanan dalam industri pariwisata bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang positif bagi wisatawan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan industri pariwisata dan ekonomi di suatu destinasi (Riadi, 2015).

Pengertian Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah adalah sektor dalam industri pariwisata yang secara khusus menargetkan wisatawan Muslim. Konsep dasarnya adalah memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan dalam Islam. Ini mencakup berbagai aspek dalam pengalaman perjalanan wisata, mulai dari akomodasi hingga aktivitas rekreasi, dan bahkan makanan dan minuman. Selain itu, penyelenggara pariwisata syariah juga perlu memastikan bahwa wisatawan Muslim memiliki akses dan fasilitas untuk menjalankan ibadah mereka selama perjalanan dan berwisata. Ini bisa mencakup penyediaan tempat untuk shalat, informasi mengenai lokasi masjid terdekat, serta pengaturan perjalanan yang memungkinkan wisatawan untuk menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Dengan demikian, pariwisata syariah berupaya memberikan pengalaman wisata yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga wisatawan Muslim dapat menjalani perjalanan mereka dengan keyakinan dan kenyamanan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka (Rahmad Kurniawan, 2020).

pariwisata juga dapat memberikan dorongan ekonomi melalui konsumsi dan investasi. Wisatawan yang berkunjung akan menghabiskan uang untuk berbagai keperluan seperti makanan, penginapan, transportasi, dan berbelanja. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut dan mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Selain itu, sektor pariwisata sering menjadi sumber investasi dalam infrastruktur pariwisata seperti pengembangan objek wisata, bandara, jalan, dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan (Kartika, 2016).

Di sisi lain, pelayanan dalam industri pariwisata mencakup semua aspek yang memastikan pengalaman wisatawan menjadi lancar, nyaman, dan berkesan. Ini melibatkan layanan pelanggan di hotel, restoran, maskapai penerbangan, agen

perjalanan, dan tempat-tempat wisata. Pelayanan juga mencakup promosi dan informasi mengenai destinasi wisata, serta keamanan dan keselamatan para wisatawan selama perjalanan mereka. Secara keseluruhan, produk dan pelayanan dalam industri pariwisata bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang positif bagi wisatawan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan industri pariwisata dan ekonomi di suatu destinasi (Riadi, 2015).

Pengertian Moslem Friendly

Terminologi wisata syariah atau wisata halal di beberapa negara menggunakan istilah *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Definisi pariwisata syariah yaitu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang dikarenakan karakteristik produk dan jasa layanan yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.

Konsep syariah yang tidak bertentangan dengan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan industri. Perspektif agama yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim. Sedangkan dalam perspektif industri, bagi produsen pangan konsep ini dapat menjadi peluang bisnis yang target konsumennya sebagian muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk sehingga meningkatkan nilai yang berupa *intangible value*. Misalnya produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Febriyana, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi lapangan (*field research*), di mana data diperoleh secara langsung dari lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati (Fadli, 2021). Adapun lokasi penelitian bertempat di kolam renang Muslimah ACM di kota Tangerang Selatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer (1) Fatwa Dsn-Mui No.106/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, (2) Hasil wawancara, (3) dan hasil observasi. Sumber data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur kepustakaan yakni dari sumber Al-Quran, Hadist, buku-buku ilmiah dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data pada penulisan ini menggunakan metode analisis Deskriptif-Evaluatif. Analisis deskriptif yang dimaksud dimaksud dengan memaparkan apa adanya tentang

suatu peristiwa atau kondisi.lalu akan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu peristiwa atau kondisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kolam Renang Muslimah ACM

Kolam renang ACM merupakan bagian dari Annisa Cantika Mandiri (ACM) yang terletak di Jl. Lingkar Selatan, Jl. Baru Asih, Jl. Muncul, Kota Tangerang Selatan, Banten. ACM adalah singkatan dari Annisa Cantika Mandiri, yang menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kolam renang Muslimah ACM memiliki dua kolam yang dirancang khusus, satu untuk orang dewasa dan satu lagi untuk anak-anak. Ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap kebutuhan berenang bagi berbagai kelompok usia dalam komunitas Muslimah. Selain menjadi tempat rekreasi, kolam renang ini juga memfasilitasi kegiatan pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang ingin melibatkan murid-muridnya dalam kegiatan renang.

Sejarah berdirinya kolam renang ACM Muslimah

Kolam renang Muslimah ACM, yang berdiri sejak tahun 2014, menandai keberadaan satu-satunya kolam renang di wilayah Tangerang Selatan yang secara eksklusif menghususkan diri untuk pelayanan kepada kaum Muslimah. Inisiatif ini tidak hanya merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan rekreasi dan olahraga bagi perempuan Muslim, tetapi juga mencerminkan cita-cita dari para pendiri kolam renang ini, yaitu untuk membantu menciptakan komunitas perempuan yang cantik dan mandiri. Awalnya, kolam renang ini didesain untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi kaum Muslimah dalam menjalankan aktivitas rekreasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan dari komunitas kaum laki-laki dan keluarga mengalami peningkatan. Hal ini membawa pengelola kolam renang untuk merespons dengan memberikan waktu tertentu bagi kaum laki-laki dan keluarga agar mereka juga dapat menikmati fasilitas yang disediakan.

Mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan kolam renang ACM Muslimah

Kolam Renang ACM Muslimah, sebagai destinasi wisata yang menerapkan prinsip-prinsip syariah,namun masih memiliki beberapa aspek pengelolaan dan penyelenggaraan yang masih perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah.

Pertama-tama, fasilitas ibadah berupa musholla yang disediakan di kolam renang ini, meskipun nyaman, tetapi dianggap masih kecil dalam segi ukuran. Dalam konteks wisata syariah, penting untuk memastikan bahwa tempat ibadah tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga cukup besar untuk menampung pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Oleh karena itu dari pihak penyelenggara dan pengelola kolam renang Muslimah ACM,

perlu dilakukan evaluasi dan perluasan terkait tempat ibadah demi kenyamanan dan kekhusyuan pengunjung dalam melakukan ibadah.

Kedua, aspek kebersihan lingkungan sekitar kolam renang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pihak penyelenggara dan pengelola kolam renang Muslimah ACM. Meskipun kolam renang sendiri mungkin sudah bersih, akan tetapi masih ada titik-titik kotor di sekitar lokasi dan itu dapat mempengaruhi kesan keseluruhan wisatawan ketika melakukan kunjungan. Kebersihan lingkungan adalah faktor penting dalam Islam, dan oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga kebersihan sekitar area kolam renang.

Pengelolaan karyawan yang melibatkan warga sekitar, terutama perempuan, memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Ini tidak hanya memberikan peluang pekerjaan tetapi juga memberdayakan perempuan dalam lingkup ekonomi sekitar lokasi kolam renang Muslimah ACM. Dan yang paling penting adalah Pemisahan jam kerja untuk karyawan laki-laki dan perempuan, dengan pertimbangan pekerjaan yang lebih teknis dilakukan oleh karyawan laki-laki pada pagi hari, adalah langkah yang baik dan untuk teknis pelayanan di lakukan oleh karyawan Perempuan dari mulai jam dibukanya kolam renang sampai dengan waktu tutup.

Beberapa makanan yang dibuat di tempat atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*home made*" belum memperoleh sertifikat halal. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, di mana pengelola perlu berkomitmen untuk melakukan upaya lebih lanjut guna memastikan bahwa semua makanan yang disajikan memenuhi standar halal yang ketat. Perbaikan ini tidak hanya menjadi kewajiban praktis untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, tetapi juga mencerminkan semangat pengelola dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung. Sebagai langkah selanjutnya, dapat dilakukan peningkatan pengawasan dan penilaian terhadap penyediaan makanan home made, dengan memprioritaskan sertifikasi halal sebagai langkah kritis menuju kesempurnaan dalam penyelenggaraan wisata syariah di Kolam Renang ACM Muslimah. Dengan demikian, pengunjung dapat merasakan pengalaman wisata yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah tanpa kekhawatiran akan kehalalan produk yang mereka nikmati.

Terakhir, fasilitas lainnya seperti ruang tunggu Suasana tenang dan nyaman menyambut pengunjung ketika mereka memasuki area ini. Pemisahan antara ikhwan dan akhwat, selain untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kedua kelompok. Meskipun demikian, ruang tunggu untuk keluarga tetap menjadi titik pertemuan yang dapat dinikmati bersama.

Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah Pada Kolam Renang ACM Muslimah.

Kolam Renang Muslimah ACM adalah kolam renang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan dan pengelolanya, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Meskipun kolam

renang ini menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya, terdapat beberapa temuan yang dapat diidentifikasi berdasarkan informasi yang diberikan:

Pertama, terdapat kekurangan dalam fasilitas tempat ibadah, terutama dari segi ukuran, yang membuatnya kurang nyaman bagi pengunjung. Diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam fasilitas tersebut agar sesuai dengan standar kenyamanan dan kebutuhan bagi pengguna yang ingin melaksanakan ibadah. Selanjutnya, terdapat permasalahan terkait makanan *home made* yang belum bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan standar kehalalan pada seluruh produk makanan yang disajikan di kolam renang ini, sejalan dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016.

Tidak hanya itu, beberapa titik area di kolam renang teridentifikasi masih kurang bersih, menciptakan ketidaknyamanan dalam hal kebersihan lingkungan. Peningkatan dalam pengelolaan kebersihan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kolam renang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang berlaku. Pemanfaatan warga sekitar sebagai karyawan dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.

Namun, penting untuk memastikan bahwa karyawan tersebut mendapatkan pelatihan dan pengetahuan yang memadai terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di kolam renang. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu perbaikan, kolam renang Muslimah ACM telah berhasil menarik banyak pengunjung setiap harinya, termasuk dari kalangan sekolah-sekolah yang memanfaatkannya untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini mencerminkan bahwa kolam renang telah menjadi bagian integral dari komunitas, dan potensi pengembangan lebih lanjut dapat diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan pedoman DSN-MUI.

SIMPULAN

Penyelenggaraan dan pengelolaan berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah adalah suatu kegiatan wisata yang secara khusus diarahkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspeknya. Fatwa tersebut mencakup berbagai aspek yang melibatkan penyediaan fasilitas, akad antar pihak, dan aturan yang secara konsisten mengarah pada implementasi prinsip syariah. Kolam renang muslimah ACM sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan dan pengelolanya, akan tetapi ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah yaitu tempat ibadahnya masih terlalu kecil, dan sebagian area sekitar kolam masih kurang bersih. Fasilitas tempat ibadah perlu diperbesar agar lebih nyaman bagi pengunjung yang ingin beribadah. Selain itu, kebersihan di sekitar kolam perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan perbaikan ini, Kolam Renang Muslimah ACM bisa memberikan pengalaman yang

lebih baik kepada pengunjung dan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka terapkan.

REFERENSI

- Anden, T. E. (2021). Masa Depan Industri Pariwisata Kota Palangka Raya (Perspektif dan Solusinya). *Jurnal Penelitian UPR*, 1(1), 9-16. <https://doi.org/10.52850/jptupr.v1i1.3157>
- Ansari, M. H. &. (2020). " Volume 1, No. 2, Nopember 2020 ." 1(2), 1-19.
- Arifin, J. (2015). *Wawasan Al-quran Dan Sunnah Tentang Pariwisata Oleh : Johar Arifin*. 4(2), 147-166.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. *COPAS: Conference on Public Administration and Society*, 01, 331-353.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Febriyana, L. L. (2021). (*Halal Tourism*) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Skripsi Oleh : Layin Lia Febriana Nim 210717134 Pembimbing Dr . Luhur Prasetyo , S . Ag ., M . E . I . Jurusan Ekonomi Syariah.
- Ilham, M., Firdaus, A., Dani, R., & Batusangkar, I. (2022). Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108 / Dsn- Mui / X / 2016. *National Conference on Social Science and Religion*, 1, 892-897.
- Kartika, T. (2016). *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial Budaya Dan Lingkungan Fisik Di Desa Ppanjalu*.
- Mujib, F. (2015). Perkembangan Fatwa Di Indonesia Fatkul Mujib Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Metro. *Jurnal Nizham*, 4(1), 95-121.
- Rahmad Kurniawan. (2020). Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah. In *K-Media Yogyakarta*. <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>
- Riadi, M. (2015). *Pengertian dan Jenis Usaha Pariwisata*.
- Riani, N. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2. *Jurnal Inobasi Penelitian*, 2(5), 1469-1474.
- Sajari, D. (2015). Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 44-62. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.38>
- Sani, A. F. I. (2021). *Telah Berusia 46 Tahun, Simak Sejarah MUI*. <https://nasional.tempo.co/read/1489070/telah-berusia-46-tahun-simak-sejarah-mui>

- Yulfianis. (2021). *Implementasi Fatwa Dsn Mui No . 108 / Penyelenggaraan Pariwisata Iplementasi Fatwa Dsn Mui No . 108 / Dsn - Mui / X / 2016 Tentang Pedoman. 108.*
- Yulianti, D. (2020). *Dampak Pengembangan Pariwisata TEerhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Objek Wisata Pantai Tanjung Setia, Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat).*